

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Pada Program Kotaku Kabupaten Deli Serdang

Anna Elvita, Alistraja Dison Silalahi, Debby Chyntia Ovami

Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, UMN Al Washliyah, Medan, Indonesia

Email: ¹annaelvita@gmail.com, ²alistranja.disonsilalahi@gmail.com ³debbichyntiaovami@umnaw.ac.id

Abstrak-Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana pinjaman bergulir pada Program KOTAKU Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini dilakukan di wilayah Program KOTAKU Kabupaten Deli Serdang yaitu pada 30 Desa/Kelurahan yang tersebar di Kabupaten Deli Serdang dari total 101 desa/kelurahan yang menerima Program KOTAKU. Data diperoleh dari hasil pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 12 indikator akuntabilitas yang menjadi kondisi ideal terdapat 9 indikator yang dapat terpenuhi yaitu akuntabilitas peruntukan dana (mencakup 7 indikator), akuntabilitas pengelolaan keuangan (mencakup 1 indikator) dan akuntabilitas administrasi dan pelaporan (mencakup 1 indikator) serta dari 6 indikator transparansi yang menjadi kondisi ideal terdapat 5 indikator yang tidak dapat dipenuhi sehingga berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana pinjaman bergulir kurang akuntabel dan tidak transparan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pinjaman Bergulir, Program KOTAKU

1. PENDAHULUAN

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam percepatan penanganan permukiman kumuh di Indonesia yang menjadi Program Nasional sejak tahun 2015. Program KOTAKU sebagai Program Payung (*umbrella policy*) untuk mensinergikan program pemberdayaan masyarakat, yang dimulai dengan sinergi atau fokus harmonisasi program pemberdayaan yaitu PNPM Mandiri Perkotaan dan Program Pemberdayaan Lainnya sebagai motor program di wilayah masing-masing.

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi ini harus ditaati secara konsisten oleh semua pelaku Program KOTAKU tanpa terkecuali. Pengelolaan dana Pinjaman Bergulir yang tidak akuntabel dan transparan akan mengakibatkan kerugian pada masyarakat yang seharusnya berhak memanfaatkan dana tersebut. Pelaporan pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan merupakan kewajiban bagi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), karena dana yang diterima merupakan dana dari pemerintah sehingga di dalam pengelolaaannya harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan demi tercapainya tujuan Program KOTAKU dan terciptanya akuntabilitas publik. Oleh karena itu penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi harus diterapkan secara optimal sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam Program KOTAKU.

Seiring dengan penyelenggaraan kegiatan Pinjaman Bergulir yang dilaksanakan di tingkat kelurahan/desa, banyak masalah yang terjadi dalam praktek pengelolaaannya, mulai dari dana yang disalurkan tidak tepat sasaran kepada masyarakat, pengembalian yang tidak lancar (terjadinya kredit macet), pelaporan tidak tepat waktu, kurang tertibnya administrasi, kurangnya keterbukaan kepada masyarakat (kurang berfungsinya papan informasi) serta terjadinya penyimpangan/penyalahgunaan dana merupakan masalah yang paling sering ditemukan di lapangan. Hal ini menunjukkan lemahnya akuntabilitas dan transparansi di dalam pengelolaan dana Pinjaman Bergulir. Sehingga sangatlah perlu untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan dana Pinjaman Bergulir Program KOTAKU.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Subjek penelitian yang digunakan adalah para pelaku Program di tingkat kelurahan yang ada di Kabupaten Deli Serdang yaitu 30 orang pengurus BKM/UPK, 30 orang Kades/Lurah (aparatur desa), 1 orang Fasilitator Kelurahan (Pendamping) Manajemen Keuangan serta KSM/masyarakat. objek penelitian ini adalah Pengelolaan dana Pinjaman Bergulir Program KOTAKU Kabupaten Deli Serdang yang berfokus pada akuntabilitas dan transparansinya. Dalam penelitian ini data primer berupa catatan hasil wawancara kepada BKM/UPK, KSM/Masyarakat, Fasilitator dan Lurah/Kades serta hasil pengamatan langsung terhadap praktek pengelolaan pinjaman bergulir. Dalam penelitian ini data sekunder berupa laporan publikasi melalui studi pustaka dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dimana metode ini digunakan untuk menggambarkan rumusan masalah.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dari keseluruhan hasil analisis akuntabilitas terhadap pengelolaan dana Pinjaman Bergulir menunjukkan bahwa dari 12 indikator akuntabilitas yang menjadi kondisi ideal terdapat 9 indikator yang dapat terpenuhi yaitu akuntabilitas peruntukan dana (mencakup 7 indikator), akuntabilitas pengelolaan keuangan (mencakup 1 indikator) dan akuntabilitas administrasi dan pelaporan (mencakup 1 indikator) dan 3 indikator yang tidak terpenuhi yaitu akuntabilitas lembaga

pengelola (mencakup 1 indikator), akuntabilitas administrasi dan pelaporan (mencakup 1 indikator) mengenai pembukuan dan akuntabilitas pengembalian dana (mencakup 1 indikator).

Penerapan akuntabilitas yang mencakup pada indikator yang sudah tercapai harus dapat dipertahankan oleh pengurus BKM/UPK hal ini sangat berdampak positif terhadap keberlangsungan program pinjaman bergulir karena melalui akuntabilitas yang baik akan membangun suatu kepercayaan publik sehingga tata kelola penyelenggaraan pengelolaan dana pinjaman bergulir yang baik dapat tercapai. Pengelolaan dana pinjaman bergulir yang kurang akuntabel akan membawa dampak yang kurang baik pula terhadap program dan masyarakat. Dimana akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting di dalam pengelolaan danabpublik. Dana publik dalam hal ini mengandung makna bahwa semua masyarakat berhak memperoleh informasi keberadaan dan pemanfaatan dana pinjaman bergulir yang dikelola oleh masyarakat di lokasi sasaran program. Selain itu dana pinjaman bergulir juga tidak boleh digunakan secara sembarangan melainkan harus dikelola dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan sepenuhnya bagi kepentingan perbaikan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah yang ada di wilayah program.

Hasil penelitian yang sekarang ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan alawiyah (2017) yaitu UPK selalu menyiapkan laporan penggunaan dananya karena suatu keharusan sedangkan laporan keuangan hanya dibuat sebatas kebutuhan primer UPK dan hanya diberikan kepada pendamping. Laporan keuangan tidak diberikan kepada Sektap Kota sebagai pelaksana program kegiatan sehingga perkembangan dana UPK dari tahun ke tahun secara rinci tidak dapat diketahui oleh Sektap Kota. Tetapi tidak sejalan dengan Aryanti, dkk (2013) yaitu manajemen dana PNPM Mandiri di BKM Betul telah akuntabel dan transparan.

Dari keseluruhan hasil analisis transparansi terhadap pengelolaan dana Pinjaman Bergulir menunjukkan bahwa dari 6 indikator transparansi yang menjadi kondisi ideal terdapat 5 indikator yang tidak dapat terpenuhi yaitu indikator mengenai dana yang diterima BKM dan pengalokasiannya sebesar 20%, indikator mengenai penyampaian dan penempelan laporan keuangan sebesar 0%, indikator mengenai daftar tunggu KSM sebesar 0%, indikator mengenai rekening bank diumumkan ke masyarakat sebesar 0%, indikator nama Peminjam diumumkan sebesar 0%. Adapun 1 indikator yang tercapai yaitu penetapan kebijakan keuangan yang didasarkan pada rembug bersama sebesar 73,7%.

Dampak yang terjadi pada masyarakat apabila tidak adanya transparansi akan menyebabkan kurangnya kontrol sosial terhadap pengelolaan dana pinjaman bergulir dikarenakan ketidaktahuan akan informasi penting yang harus diketahui seperti besarnya dana yang diterima dan alokasinya., laporan keuangan, daftar tunggu KSM, saldo dana yang ada di rekening bank, dan nama-nama peminjam. Tentu saja kurangnya kontrol sosial ini akan menciptakan peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan minimnya informasi yang didapatkan akan menyebabkan terjadi miss communication dan salah persepsi. Sedangkan dampak yang ditimbulkan kepada Program KOTAKU dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan semua pihak (trust building) terhadap pelaksanaan program secara keseluruhan. Yang pada akhirnya akan menghambat pihak-pihak kreditur untuk melakukan investasi dana padahal kebutuhan akan modal pinjaman bergulir masih sangat diperlukan.

4. KESIMPULAN

- a. Berdasarkan analisis data dan hasil wawancara yang dilakukan kepada pengurus BKM/UPK dan Kepala Desa/Lurah, dari 12 indikator akuntabilitas yang menjadi kondisi ideal terdapat 9 indikator yang dapat terpenuhi secara ideal, yaitu akuntabilitas peruntukan dana (mencakup 7 indikator) dengan masing-masing indikator dana diterima utuh dan tersalur tanpa potongan, tidak ada penyalahgunaan dana/korupsi, kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan usulan yang disetujui, anggota KSM yang tercantum di proposal sesuai dengan realisasi, minimal 90% dana pinjaman bergulir sudah disalurkan, tidak ada pemotongan dana KSM/masyarakat sebesar 100% dan indikator penerima manfaat sesuai dengan Daftar PS2 sebesar 73,3%. Akuntabilitas pengelolaan keuangan (mencakup 1 indikator) sudah sesuai dengan AD/ART sebesar 100%. Akuntabilitas administrasi dan pelaporan (mencakup 1 indikator) dimana indikator penarikan rekening bank sebesar 100%. Adapun 3 indikator lainnya tidak dapat tercapai secara ideal yaitu akuntabilitas lembaga pengelola (mencakup 1 indikator) sebesar 33,3%, akuntabilitas administrasi dan pelaporan (mencakup 1 indikator) mengenai pembukuan sebesar 36,7% masih ada pihak terkait yang tidak mendapat laporan keuangan dan tidak lengkapnya pembukuan yang dibuat oleh petugas UPK dan akuntabilitas pengembalian dana (mencakup 1 indikator) dimana tingkat pengembalian minimal 90% hanya tercapai sebesar 36,7%.
- b. Berdasarkan analisis data dan hasil wawancara yang dilakukan kepada pengurus BKM/UPK dan Kepala Desa/Lurah, dari 6 indikator transparansi yang menjadi kondisi ideal terdapat 5 indikator yang tidak dapat terpenuhi secara ideal, yaitu indikator mengenai dana yang diterima BKM dan pengalokasiannya sebesar 20%, indikator mengenai penyampaian dan penempelan laporan keuangan sebesar 0%, indikator mengenai daftar tunggu KSM sebesar 0%, indikator mengenai rekening bank diumumkan ke masyarakat sebesar 0%, indikator nama Peminjam diumumkan sebesar 0%. Adapun 1 indikator yang tercapai mengenai penetapan kebijakan keuangan yang didasarkan pada rembug bersama sebesar 73,7%.
- a. Secara keseluruhan pengelolaan dana Pinjaman Bergulir berdasarkan akuntabilitas sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun ada beberapa indikator masih kurang akuntabel dan untuk transparansi pengelolaan dana Pinjaman Bergulir masih belum sesuai dengan SOP yang berlaku (tidak transparan).

Berikut saran yang bisa disampaikan dalam pengelolaan dana pinjaman bergulir adalah :

- a. Kegiatan Pinjaman Bergulir sebaiknya tetap dilaksanakan mengingat besarnya manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat
- b. Agar dana Pinjaman Bergulir tetap disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, lebih akuntabel dan transparan sehingga seluruh masyarakat dapat memantau dana Pinjaman Bergulir.

- c. Pengurus BKM/UPK hendaknya tidak hanya terfokus pada sumber dana yang diberikan oleh pemerintah, sehingga bisa tetap aktif dalam menjalankan kepengurusannya
- d. Agar pengurus lebih transparan dan menempelkan informasi tentang keuangan (pembukuan dan buku rekening UPK) serta lebih meningkatkan kordinasi dengan pihak desa minimal 3 bulan sekali tentang perkembangan kegiatan Pinjaman Bergulir.
- e. Berdasarkan akuntabilitas diharapkan BKM/UPK dapat meningkatkan lagi administrasi dan pelaporan, terutama pembukuan harus sudah bisa dikerjakan oleh petugas serta melengkapi bukti-bukti transaksi dan dilaporkan tepat waktu.
- f. Mengingat masih kurangnya/terbatasnya penelitian akuntabilitas dan transparansi dari sisi masyarakat, diharapkan agar penelitian selanjutnya dapat lebih mengeksplorasi dari aspek masyarakat/KSM sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan akuntabilitas dan transparansi secara menyeluruh.

REFERENCES

- [1] Alawiyyah, Syarifah., Ludigdo, Unti., dan Mulawarman, Aji Dedi. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bergulir Pada UPK-G. Jurnal Akuntansi & Pendidikan Vol.6 No.2 Hal.130-141 Oktober 2017 Madiunp-ISSN:2302-6251 e-ISSN:2477-4995 Jurusan Akuntansi FEB Universitas Brawijaya Malang
- [2] Aryanti, Vivi Dwi., Kholmi, Masiyah., dan Wahyuni, Endang Dwi. 2013. Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Pada BKM Betul Kota Malang. Jurnal Akuntansi & Investasi Vol. 14 No.2 Juli 2013. Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang.
- [3] Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2008. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir.
- [4] Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2008. Pedoman Teknis Kegiatan Pinjaman Bergulir.
- [5] <https://administrasinegaraku.blog/ADM.NEGARA>
- [6] https://www.p2kp.org/pustaka/files/modul_transparansi_akuntabilitas
- [7] Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2008. Booklet Untuk Pendamping & Pengelola Pinjaman Bergulir.
- [8] Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2012. Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.
- [9] Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2012. Pedoman Teknis Pengawasan Keuangan UPK.
- [10] Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2012. Petunjuk Teknis Pengukuran Kinerja Pembukuan Sekretariat – UPK.
- [11] Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2014. Pedoman Teknis PPMK.
- [12] Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2016. Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40/SE/DC/2016 Perihal Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). www.kotaku.pu.go.id